



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HENDRO PRANOTO
2. Jabatan : BENDAHARA
3. NHK : 685785

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN		Rp.	1.300.000.000
1.	Tanah dan Bangunan Seluas 76 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , HASIL SENDIRI	Rp. 300.000.000	
2.	Tanah dan Bangunan Seluas 220 m2/155 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , HASIL SENDIRI	Rp. 1.000.000.000	
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN		Rp.	187.000.000
1.	MOTOR, YAMAHA N-MAX Tahun 2016, HASIL SENDIRI	Rp. 15.000.000	
2.	MOBIL, DAIHATSU MINI BUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI	Rp. 172.000.000	
C. HARTA BERGERAK LAINNYA		Rp.	---
D. SURAT BERHARGA		Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS		Rp.	575.357
F. HARTA LAINNYA		Rp.	---
Sub Total		Rp.	1.487.575.357
III. HUTANG		Rp.	1.312.080.966
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)		Rp.	175.494.391

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.